**EKSISTENSI HUKUM ADAT DALAM MENYELESAIKAN
KEKERASAAN DALAM RUMAH TANGGA DI DESA
PINJAUAN KANAGARIAN PILUBANG
KECAMATAN SUNGAI LIMAU
KABUPATEN PADANG
PARIAMAN**

Oleh: Putri Asri Sri Rahayu

Pembimbing 1 : Dr. Erdianto, S.H., M.H

Pembimbing 2 : Dr. Mukhlis R, S.H.,

Alamat : Jln. Karya/iklas No.25, Pekanbaru

Email : rahayuputri296@gmail.com- Telepon : 0822999903572

ABSTRACT

Indonesia is a state of law (rechstaat) where the legal provisions rely or are guided by the Pancasila and the 1945 Constitution, as a rule they must not conflict with higher laws because they apply nationally. But in social life besides national law, there are also laws that grow and develop in society, where the law is born from the habits or attitudes and behavior of the people themselves who are often referred to as habits. This custom or habit will develop into a provision called adat law. That customary law still lives in each region. Particularly in the Penagarian Village of Pilubang Village, Sungai Limau Subdistrict, Padang Pariaman District, customary law still exists used by the community in resolving criminal acts of domestic violence. For this reason, the writer is interested in conducting research as a scientific work in the form of a thesis with the title "Existence of Customary Laws in Resolving Domestic Violence in the Kanagarian Pilubang Village, Sungai Limau District, Padang Pariaman District".

The purpose of this study is to find out: first how the implementation of settlement of domestic violence in the village of Pubang Kanagarian Pilubang District Sungai Limau. second, how are the obstacles faced in resolving domestic violence in the village of Pubang Kanagarian Pilubang, Sungai Limau District. In this study the author uses empirical (sociological) juridical writing methods, namely an approach to the problem by looking at the applicable legal norms, connected with the facts in the problems encountered.

From the results of the study it can be concluded that. Settlement of domestic violence in the Pilubang Kanagarian Village is a preparation, determining the day and date, as well as the location of the traditional session to be held, deliberation to decide the domestic violence case, giving advice by traditional leaders and religious leaders, paying the agreed fines. The constraints faced in resolving domestic violence in Desa Pinjauan are self factors, law enforcement factors, community factors, cultural factors.

Keywords: Existence-Customary Law-Domestic Violence

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum adat adalah suatu hukum yang hidup, karena menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat. Sesuai dengan fitrahnya sendiri, hukum adat terus-menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri.¹ Hukum adat mengatur tindakan yang melanggar perasaan keadilan dan kepatutan yang hidup di tengah masyarakat sehingga menyebabkan terganggunya ketentraman serta keseimbangan masyarakat, untuk memulihkan ketentraman dan keseimbangan tersebut maka terjadi reaksi adat.² Keberadaan hukum adat pada masyarakat merupakan pencerminan kehidupan masyarakat dan pada masing-masing daerah memiliki Hukum Adat yang berbeda sesuai dengan adat istiadat yang ada di daerah tersebut dengan ciri khas tidak tertulis ataupun tidak terkodifikasikan.³

Adat Minangkabau merupakan peraturan dan undang-undang atau hukum adat yang berlaku dalam kehidupan sosial orang-orang Minangkabau, terutama yang bertempat tinggal di alam Minangkabau⁴. Adat Minangkabau adalah suatu pandangan hidup yang berpangkal pada budi. Budi berdasarkan ketentuan-ketentuan yang nyata dalam alam sebab alam adalah semata-mata budi yang bersifat memberi dengan tidak mengharap balas⁵. Adat Minangkabau merupakan falsafah kehidupan yang menjadi budaya dan kebudayaan Minangkabau. Ia juga sekaligus merupakan suatu aturan dan tata cara kehidupan masyarakat Minangkabau yang disusun berdasarkan

musyawarah dan mufakat serta diturunkan secara turun temurun secara alamiah⁶.

Kekerasan dalam rumah tangga adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi.⁷ Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga merupakan delik aduan. Delik aduan menentukan bahwa pengaduan adalah satu-satunya syarat bagi diprosesnya suatu delik. Tanpa pengaduan tidak mungkin ada penindakan.⁸

Dalam adat dan budaya Minangkabau suami tidak dibenarkan melakukan tindakan kekerasan terhadap istri atau sebaliknya karena itu merupakan perbuatan menyimpang dari ajaran-ajaran agama. Nilai-nilai sosial dalam adat dan budaya Minangkabau yang tidak membenarkan suami melakukan tindakan kekerasan terhadap istri atau sebaliknya menurut seorang yang berstatus mamak dapat dilihat dari nilai dasar kehidupan masyarakat Minangkabau yaitu “*adat basandi syarak, syarak basandi kitabulloh*” dan “*bajanjang naiak, batanggo turun*” Tidak ada masalah yang tidak diselesaikan, dan ketika laki-laki (suami) masuk kedalam rumah/meminta izin istri maka yang berhak memberi izin adalah mamak.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Eksistensi Hukum Adat Dalam Menyelesaikan Kekerasan Rumah Tangga Di Desa Pinjauan Kanagarian Pilubang Kecamatan Sungai Limau Kabupaten Padang Pariaman**”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga di Desa Pinjauan Kanagarian Pilubang Kecamatan Sungai Limau ?
2. Apakah kendala-kendala yang dihadapi dalam menyelesaikan kekerasan dalam

¹ Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, PT. Pradnya Paramitha, Jakarta, 2000, hlm. 3.

² Tri Rahmadhaniati, “Penerapan Sanksi Adat Terhadap Pelaku Zina Di Desa Kampung Baru Sentoja Kecamatan Sentoja Raya Kabupaten Kuansing”, *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Riau*, Pekanbaru, 2018, hlm. 2.

³ *Ibid*, hlm. 3.

⁴ Amir Sjarifoedin, *Minangkabau Dari Dinasti Iskandar Zulkarnain Sampai Tuanku Imam Bonjol*, PT Gria Media Prima, Jakarta, 2011. hlm. 56.

⁵ Musyair Zainuddin, *Minangkabau dan adatnya : adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*, Ombak, Yogyakarta, 2013, hlm. 18.

⁶ Amir Sjarifoedin, *Loc.cit*

⁷ Andrew Lionel Lawdika, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Lex Crime Vol. V/No. 2/ Feb/ 2016, hlm. 30.

⁸ Erdianto Effendi, *Op. Cit.* hlm. 198.

rumah tangga di Desa Pinjauan Kanagarian Pilubang Kecamatan Sungai Limau?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga di Desa Pinjauan Kanagarian Pilubang Kecamatan Sungai Limau.
- b. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam menyelesaikan kekerasan dalam rumah tangga di Desa Pinjauan Kanagarian Pilubang Kecamatan Sungai Limau.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk menambah wawasan bagi peneliti mengenai pelaksanaan penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga di Desa Pinjauan Kanagarian Pilubang Kecamatan Sungai Limau.
- b. Untuk menambah referensi perpustakaan dan sebagai sumbangan peneliti terhadap almamater Universitas Riau khususnya Fakultas Hukum serta bagi seluruh pembaca.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan sumbangan pemikiran kepada Pemerintah Daerah (propinsi dan kabupaten) tentang penyelesaian secara adat kekerasan dalam rumah tangga.

D. Kerangka Teori

1. Teori Pemberlakuan Hukum

a. Teori Berlaku Hukum Secara Filosofis

Artinya kekuatan berlakunya hukum itu ada landasan filosofisnya. Landasan filosofis sebuah undang-undang misalnya dapat dicari dan di temukan dalam undang-undang itu sendiri, yaitu dasar pokok pikiran sehingga undang-undang itu dibuat.

b. Teori Berlakunya Hukum Secara Sosiologis

Menurut ahli Sosiologis dan Antropologi Budaya, “ Sumber Hukum adalah seluruh masyarakat”, yang ditinjau melalui seluruh lembaga-lembaga sosial. Sehingga diketahui lah apa yang pantas untuk menjadi hukum yang merupakan kaidah yang dibuat oleh para penguasa

masyarakat dan disertai sanksi dalam berbagai lembaga-lembaga sosial.

c. Teori Berlakunya Hukum Secara Yuridis

Kualifikasi kaidah hukum berasal dari pendapat umum, dimana pendapat ini timbul dari peristiwa-peristiwa yang timbul dalam masyarakat yang dapat mempengaruhi dan menentukan sikap manusia. Akan tetapi sebelum dapat berlaku umum di masyarakat maka penghargaan yuridis tentang suatu peristiwa sosial tertentu harus diberi bentuk tertentu. Bentuk tersebut merupakan apa yang disebut sumber hukum formil.

Pemberlakuan hukum digunakan untuk mewujudkan keadilan yang maksimal mungkin dalam tata tertib masyarakat. Keadilan tidak sama dengan persamaan, tetapi keseimbangan. Masyarakat Indonesia cenderung menggunakan hukum adat dalam menyelesaikan sengketa termasuk sengketa yang bersifat pidana, hal mana yang ditentang oleh keberadaan asas legalitas. Dalam masyarakat adat, penyelesaian sengketa di dasarkan pada kesepakatan dan hasil rembuk, bukan berdasarkan pada suatu kaidah tertulis.⁹

2. Teori Resepsi a Contrario

Teori *receptie* ini pertama kali diajukan oleh Snouck Hugronje, yang diikuti oleh Van Vollenhoven, Sebagai kritik terhadap teori *reception in complexu*. Teori ini menyatakan bahwa hukum yang hidup dan berlaku bagi rakyat Indonesia terlepas dari agama yang dianutnya adalah hukum adat, sedangkan hukum Islam meresepti kedalam dan berlaku sepanjang dikehendaki oleh hukum adat.¹⁰

Teori *receptie* ini telah dibantah dan mendapatkan kritikan tajam oleh seorang ahli hukum Indonesia yaitu Haizairin. Pada konferensi Departemen Kehakiman Salatiga tahun 1950 Haizairin mengatakan bahwa hukum Islam yang berlaku di Indonesia bukanlah didasarkan oleh hukum adat, namun atas dasar Al-Qur'an dan Hadits. Bagi masyarakat Islam, hukum yang berlaku dan

⁹ Erdianto Effendi, *Op.cit*, hlm. 69.

¹⁰ Muhammad Rido I, *Op. Cit*, hlm.11.

mengatur segala aspek kehidupannya adalah hukum Islam. Hazairin sangat menolak teori *receptie* tersebut, bahkan ia menyebutkan bahwa teori *receptie* Snouck Hurgronje adalah teori iblis,¹¹ karena mengandung maksud untuk menghapus berlakunya hukum Islam bagi masyarakat Indonesia. Dan ini bertentangan dengan keimanan seorang muslim untuk mentaati agamanya. Oleh karena itu, teori *receptie* sangat indetik dengan tugas yang diemban oleh iblis sebagai musuh manusia.¹² Atas dasar inilah Haizairin melahirkan satu teori yang sesuai dengan keyakinan, cita-cita hukum, dan cita-cita moralnya, yakni teori ini mengemukakan bahwa hukum adat bisa berlaku bagi orang Islam manakala tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dengan demikian jelaslah bahwa teori *Receptio A Contrario* merupakan kebalikan dari teori *Receptie*.

E. Kerangka Konseptual

1. Eksistensi adalah keberadaan, kehadiran yang mengandung unsur bertahan.¹³
2. Hukum Adat adalah adanya tingkah laku yang terus menerus dilakukan oleh masyarakat, teratur, dan sistematis, mempunyai nilai sakral, adanya pemuka dan pemangku adat, adanya sanksi hukum, tidak tertulis dan ditaati oleh masyarakat.¹⁴
3. Tindak Pidana menurut Van Hamel adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam wet (undang-undang), yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.¹⁵
4. Kekerasan dalam Rumah Tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 diartikan sebagai setiap perbuatan terhadap

¹¹ Haizairin, *Demokrasi Pancasila*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990, hlm. 97

¹² Syahrizal, *Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia :Refleksi terhadap Beberapa Integrasi Hukum dalam Bidang Kewarisan di Aceh*, Nadya Foundation, Aceh, 2004, hlm. 177.

¹³Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm. 182

¹⁴ Suwardi MS, Rahmad Hendra, *et. al.*, *Hukum Adat Melayu Riau*, Pekanbaru, 2011, hlm. 17.

¹⁵ Diah Gustiniati dan Budi Rizki, *Azaz-Azaz & Pemidanaan Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandar Lampung, BP. Justice Publisher, 2014, hlm. 84.

seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga¹⁶.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian yang hendak melihat korelasi antara hukum dengan masyarakat, untuk mengungkap efektifitas berlakunya hukum dalam masyarakat dan mengidentifikasi hukum tidak tertulis yang berlaku pada masyarakat.¹⁷

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Pinjauan Kanagarian Pilubang Kecamatan Sungai Limau Kabupaten Padang Pariaman. Alasan peneliti tertarik memilih jenis penelitian ini sebab di desa tersebut masih menggunakan penyelesaian secara adat dalam menyelesaikan suatu permasalahan.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, atau tempat dengan sifat atau ciri yang sama.¹⁸ Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah:

- 1) Ninik Mamak di Pinjauan;
- 2) Tokoh Masyarakat di Pinjauan;
- 3) Babimkamtibmas;
- 4) Pelaku;
- 5) Korban.

b. Sampel

¹⁶ Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 1

¹⁷ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm.117

¹⁸ *Ibid*, hlm. 118.

Sampel adalah himpunan bagian dari populasi yang dapat mewakili dari keseluruhan objek penelitian. Dalam hubungannya dengan penelitian yang penulis lakukan maka menentukan sampel dari populasi yang akan diteliti menggunakan metode pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan Purposive Sampeling, yaitu menetapkan sejumlah sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada dan kategori sampelnya telah ditetapkan sendiri oleh peneliti.¹⁹ Dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

**TABEL 1.1
POPULASI DAN SAMPEL**

No	Responden	Populasi	Sampel	Presentasi
1	Ninik mamak	5	2	50
2	Tokoh Masyarakat	6	3	50
3	Babimkamtibmas	1	1	100
4	Pelaku	2	2	100
5	Korban	2	2	100
Jumlah		16	10	-

Sumber : Data Olahan Penulis Tahun 2020

4. Sumber Data

Data hukum yang disajikan dalam penelitian hukum sosiologis ini diperoleh melalui 3 (tiga) bahan hukum yaitu :

a. **Data Primer**, Data yang diperoleh langsung dari sumber utama/ informasi untuk mendapatkan data yang dibutuhkan sesuai dengan rumusan masalah yang diteliti.

b. **Data Sekunder**, Data sekunder adalah data yang diperoleh dari perantara lain bukan dari sumber utamanya, berupa penelaahan studi kepustakaan, dokumen, artikel, serta literatur yang relevan dengan penelitian ini.²⁰

1) Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum mengikat yang berkaitan dengan masalah penelitian yaitu Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

2) Bahan hukum sekunder, meliputi bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti bahan-bahan kepustakaan, dokumen, arsip, artikel, makalah, literatur, majalah serta surat kabar yang berkaitan dengan penelitian yang sedang diteliti.

3) Bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus-kamus, dan bahan hukum yang diambil dari internet.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara, wawancara yang dilakukan oleh penulis langsung untuk mengajukan pertanyaan seputar masalah penelitian kepada responden, yaitu dengan dengan teknik wawancara langsung dengan ninik mamak di pinjauan, tokoh masyarakat di pinjauan, babimkamtibmas, pelaku, korban.

b. Studi Kepustakaan

Studi dokumen yaitu dengan cara mengambil data dengan mengumpulkan bahan-bahan tertulis yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

6. Analisis Data

Data yang diperoleh dari wawancara diolah dan disajikan dalam bentuk uraian-uraian logis dan sistematis yang menghubungkan fakta yang ada dengan peraturan yang berlaku yang merupakan data *kualitatif*,²¹ yaitu: menguraikan data yang telah diperoleh dalam bentuk kalimat yang teratur, logis dan efektif sehingga dapat memberikan penjelasan atas rumusan masalah yang penulis angkat, sedangkan metode berpikir peneliti gunakan dalam penarikan kesimpulan adalah *metode deduktif*. *Metode deduktif* ialah cara berpikir yang menarik kesimpulan dari suatu

¹⁹ Muhammad Abdulkadir, *Op.cit*, hlm. 47.

²⁰ Soerjono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-press, Jakarta, 2005, hlm. 12.

²¹ Iskandar, *Metode Penelitian dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*, Gaung Persada Press, Jakarta, 2008, hlm. 219.

pernyataan yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus.²²

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Hukum Adat

1. Lahir dan berlakunya Hukum Adat

Berdasarkan perkembangan hidup manusia, terjadinya hukum itu dimulai dari pribadi manusia yang diberi tuhan akal pikiran dan perilaku. Perilaku itulah yang terus menerus oleh seseorang yang menimbulkan Perilaku pribadinya yang dilakukan berulang-ulang menjadi "kebiasaan", Perilaku kebiasaan yang ditiru, diterima dan didukung oleh masyarakat.²³ Kebiasaan yang dilakukan oleh suatu masyarakat adat lainnya maka kebiasaan itu akan menjadi masyarakat adat lainnya. Lambat laun dari kebiasaan masyarakat adat maka lahirlah "adat" dan seiring berjalannya waktu adat tersebut dilengkap dengan sanksi yang ditetapkan oleh kepala adat yang dinamakan hukum adat.

Istilah hukum adat sebenarnya berasal dari bahasa Arab " *huk'm*" dan " *adah*" (jamaknya *ahkam*) yang artinya suruhan atau ketentuan.²⁴ Secara etimologi, adat berasal dari bahasa Arab yang berarti kebiasaan. Jadi secara etimologi adat dapat di definisikan sebagai perbuatan yang dilakukan berulang-ulang lalu menjadi kebiasaan yang tetap dan dihormati orang, maka kebiasaan itu menjadi adat.

Ter Haar menjelaskan bahwa hukum adat adalah keseluruhan peraturan yang menjelma dalam keputusan-keputusan para fungsionaris hukum (dalam arti luas) yang mempunyai wibawa (*macth, authority*) sertapengaruh dan yang dalam pelaksanaannya berlaku serta merta dan dipatuhi dengan sepenuh hati.²⁵

2. Unsur-Unsur Dalam Hukum Adat

Unsur-unsur dalam hukum adat yaitu:²⁶

- a) Adanya tingkah laku yang dilakukan secara terus menerus;
- b) Adanya pola tingkah laku yang sistematis dan teratur;
- c) Adanya nilai sakral yang dipakai dalam tingkah laku tersebut;
- d) Adanya keputusan kepala adat;
- e) Adanya akibat hukum-sanksi;
- f) Tidak tertulis;
- g) Ditaati karena kepatutan dan kewibawaan.

B. Tinjauan Umum Hukum Adat Minangkabau

1. Pengertian Hukum Adat Minangkabau

Adat Minangkabau merupakan peraturan dan undang-undang atau hukum adat yang berlaku dalam kehidupan sosial orang-orang Minangkabau, terutama yang bertempat tinggal di alam Minangkabau. Ajaran-ajarannya membedakan secara tajam antara manusia dengan hewan di dalam tingkah laku dan perbuatan, yang didasarkan kepada ajaran-ajaran berbudi baik dan bermoral mulia sesama manusia dan alam lingkungannya.²⁷

2. Macam-Macam Delik Adat Dalam Hukum Adat Minangkabau

Undang-Undang Nan Salapan terdiri dari delapan pasal yang mencantumkan kejahatan. Setiap pasal mengandung dua macam kejahatan yang sifatnya sama namun kadarnya berbeda terdiri dari:²⁸

- a. *Tikam Bunuah*, *Tikam* adalah kejahatan yang berakibat melukai terhadap orang atau binatang piaraan, yang tidak menyebabkan kematian, sedangkan artinya *bunuah* adalah kejahatan yang menghilangkan nyawa seseorang atau binatang piaraan. Dibuktikan dengan mayat terbujur.

²² Burhan Ashshofa, *Op.cit*, hlm. 100.

²³ Hilman Hadikusama, *Pengantar Antropologi Hukum*, PT. Alumni Bandung, Bandar Lampung, 2004, hlm. 10.

²⁴ Erdianto Efendi, *Op.cit*, hlm. 5.

²⁵ Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Adat, Loc. cit*

²⁶ A. Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat (Dahulu, Kini Dan Akan Datang)*, Kencana, Jakarta, 2015, hlm 6-7.

²⁷ Idrus Hakimy, *Loc.Cit*

²⁸ Nasrun Dt. Marajo Sungut Edison Piliang, *Tambo Minangkahau (Budaya Dan Hukum Adat Di Minangkabau)*, Kristal Multimedia. Bukit Tinggi, 2013, hlm 174.

- b. *Upeh Racun*, *Upeh* ‘upas’ adalah sejenis racun atau ramuan berbisa yang mengakibatkan seseorang yang memakannya sakit, sedangkan *racun* adalah kejahatan menggunakan racun yang mengakibatkan seseorang yang menjadi sasaran tewas.
- c. *Samun Saka*, *Samun* artinya perbuatan merampok milik orang dengan kekerasan atau dianiaya yang menyebabkan orang itu meninggal, *saka* artinya perbuatan menyakiti seseorang karena untuk mengambil harta milik orang lain.
- d. *Sia Baka*, *Sia* artinya membakar rumah atau tanaman orang lain dengan api tetapi tidak sampai hangus keseluruhannya, sedangkan *Baka* artinya memusnahkan seluruh harta atau rumah atau tanaman orang lain sehingga hangus seluruhnya.²⁹
- e. *Maling Curi*, *Maling* dilakukan malam hari dibuktikan dengan "*upangupang takanak*", jenjang tersandar tempat memanjat dan dinding teretas, dilobangi supaya dapat masuk kedalam rumah mengambil barang orang adalah mengambil barang orang lain Curi, dilakukan siang hari.
- f. *Dago Dagi*, *Dago* artinya perbuatan menyalahi perintah atasan dengan tidak ada alasan yang tepat (salah kemenakan kepada mamak). *Dagi* artinya perbuatan membuat huru-hara di dalam nagari (salah mamak kepada kemenakan). sehingga perbuatan tersebut telah melanggar adat yang kuat dan syarak (agama).
- g. *Kicuah kicang*, *kicuah* adalah perbuatan penipuan yang merugikan orang lain. Sedang *kicang* adalah perbuatan pemalsuan yang merugikan orang lain.³⁰
- h. *Sumbang Salah*, *Sumbang* artinya perbuatan yang menggauli perempuan

yang tidak boleh dinikahi, perbuatan atau pergaulan yang salah di pandang mata. *Salah* yaitu melakukan perbuatan yang dengan terang jelas telah dilarang. baik dilarang hukum agama maupun hukum adat.³¹

3. Pembuktian Delik Adat Dalam Hukum Adat Minangkabau

Pembuktian pelanggaran pidana adat dalam hukum adat minangkabau tentang undang-undang dua belas yang dibagi menjadi dua bagian yaitu Undang-Undang Enam yang Dahulu (*tuduah*), dan Undang-Undang Enam yang Kemudian (*cemo*).

a. Undang-Undang Enam yang Dahulu (*tuduah*) berupa pembuktian kejahatan secara langsung dalam bentuk “tangkap tangan” atau berdasarkan kesaksian. Undang-undang Enam yang Dahulu (*tuduah*) terdiri atas enam pasal yang setiap pasal mengandung dua macam alasan tuduhan dengan urutan sebagai berikut:³²

- 1) *Tatumbang, taciek*. *Tatumbang* maksudnya adalah si pelaku tidak dapat membalas tuduhan yang datang kepadanya, sehingga dia tidak dapat berucap apa-apa. *Taciak* yaitu si pelaku terpaksa mengaku dan berterus terang atas tuduhan itu, bahwa yang melakukan perbuatan itu adalah dia sendiri.
- 2) *Tatando, tabukti*. *Tatando* adalah ditemukan milik si pelaku di tempat kejadian atau di tempat berlangsungnya kejadian. *Tabukti* adalah terlihat bukti yang melekat pada tubuh atau pakaian bahwa adalah pelaku kejahatan.

²⁹ Hasanuddin, “Undang Dan Pelembagaan Mahkamah Adat Minangkabau”, Universitas Andalas, makalah disampaikan pada *Seminar Internasional dan Festival Tradisi Lisan ke X* ATL Cabang Sumatera Barat, 2019 hlm. 9.

³⁰ Hendra Eka Saputra, *Op.cit.* hlm. 74.

³¹ Dt. Maruhun Batuah dan Dt. Bagindo Tanameh, *Hukum Adat Dan Adat Minangkabau*, Poesaka Aseli, Jakarta, 1956, hlm. 66.

³² Hasanuddin, *Loc.cit.*

- 3) *Taikek, takabek*. *Taikek* dapat diartikan orang yang melakukan kejadian itu ditemui sedang melakukannya. Sementara *Takabek* dimaksudkan orang melakukan kejahatan itu bertemu dilokasi terjadinya peristiwa, sehingga mereka tidak bisa lari dari lokasi tersebut.
- 4) *Tacancang, tarageh*. *Tacancang* merupakan bekas yang ditemukan akibat tindakan pelaku di tempat kejadian. *Tarageh* yaitu ditemukan pada tubuh pelaku bekas yang ditimbulkan oleh benda yang ada ditempat berlangsungnya peristiwa.
- 5) *Tahambek, tapukua*. *Tahambek* adalah pelaku tidak dapat lolos dari pengepungan. Sedang *Tapukua* adalah pelaku tertangkap setelah dikeroyok atau terpukul oleh orang yang mengejanya.
- 6) *Talala, takaja*. *Talala* yakni ditemukan pelaku dalam tempat persembunyiannya setelah dilakukan pengejaran. Sementara *Takaja* adalah pelaku dapat tertangkap dalam pengejaran.³³
- 2) *Enggang lalu, atah jatuah*. Maksudnya seseorang ditemukan di tempat kejadian bersamaan terjadinya peristiwa
- 3) *Kacondongan mato urang banyak*. Diwaktu kejadian banyak mata melihatnya. Dari sisi lain dapat pula dikisahkan bahwa hidup seseorang tiba tiba berubah secara mendadak, sedangkan orang banyak belum mengetahui asal usul perubahan itu.³⁵
- 4) *Bajua bamurah-murah*. Yaitu didapati seseorang sedang menjual barang atau alat-alat dengan harga murah sekali, sehingga menimbulkan kecurigaan bahwa barang yang dijual itu bukan miliknya.
- 5) *Bajalan bagageh-gageh*. Terlihat pelaku sedang berjalan sangat cepat sekali atau tergesa-gesa, kemudian dari air mukanya memancarkan rasa ketakutan.
- 6) *Dibaok pikek, dibaok langau*. Pikek adalah sejenis serangga yang mencari makanan pada tubuh kerbau, ukuran badannya agak besar dari lalat. Jadi maksud ungkapan *dibaok pikek, dibaok langau* yaitu pelaku ditemukan hilir mudik tanpa diketahui tujuan yang pasti.³⁶

Undang-Undang Enam yang Kemudian (*cemo*) berupa pembuktian kejahatan berdasarkan kecurigaan atau tanda-tanda tertentu yang belum tentu seseorang bersalah. *Cemo* yang enam ialah.³⁴

- 1) *Basuruik bak sipasin*. Ditemukannya bekas atau jejak di tanah menuju pelaku.

4. Sanksi Adat Dalam Hukum Adat Minangkabau

Di Minangkabau adat yang telah lama dipakai sejak turun-menurun beberapa sanksi terhadap pelanggaran norma adat sebagai berikut.³⁷

- a. Hukuman ganti atau kompensasi.

³³ *Ibid*, hlm. 10.

³⁴ <https://munirtaheer.wordpress.com/2013/01/29/undang-undang-nan-dua-puluh-dan-hukum-adat-di-silungkang/>, diakses pada tanggal 18 Maret 2020.

³⁵ A.A Navis, *Op.cit*, hlm. 112.

³⁶ Hasanuddin, *Loc.cit*.

³⁷ ST. Mahmoed BA A.Manan Rajo Penghulu, *Tambo Minangkabau Dan Bukti Sejarah*, Pustaka Indonesia, Medan, 1978, hlm 109.

- b. Hukuman denda. Denda adalah hukuman yang bersifat inmaterial. Hukuman denda dijatuhkan kepada pelaku kasus pelanggaran adat atau moral.
- c. Hukuman kucil atau pengucilan yakni pengucilan dari kaumnya sendiri, dengan konsekuensi hak dan kewajibannya terhadap kaumnya dicabut, dan sebaliknya. Bentuk pengucilan lebih berat disebut *buang biduak*, yakni dalam bentuk pengucilan oleh seluruh kaum atau penduduk *nagari* tempat kediamannya.
- d. Hukum buang. Hukuman buang dilakukan terhadap warga yang melakukan pelanggaran berulang atau pelanggaran sangat berat atau dianggap tidak mempan dengan hukuman pengucilan. Ada beberapa tingkatan hukuman buang yakni sebagai berikut:³⁸
- 1) *Buang tingkarang*, yakni tindakan pengusiran dari nagari kediamannya.
 - 2) *Buang Puluik*, yakni pelaku diusir dari nagarinya dan tidak boleh kembali lagi.
 - 3) *Buang daki*, Seseorang dibuang dari nagarinya karena telah melakukan pencurian dengan pemberatan. Segala harta miliknya diserahkan kepada orang yang menderita akibat perbuatannya.

C. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga

1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Menurut Arif Gosita, bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah “berbagai macam tindakan yang menimbulkan penderitaan mental, fisik dan sosial pada para anggota keluarga oleh sesama anggota keluarga (anak, menantu, ibu, ayah, istri, suami)”.³⁹

Sementara itu dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 1 kekerasan dalam rumah tangga di artikan sebagai: “Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dan lingkup rumah tangga.”⁴⁰

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Desa Pinjauan Kanagarian Pilubang Kecamatan Sungai Limau

Kekerasan Dalam Rumah Tangga termasuk dalam delik aduan absolut. Delik aduan absolut menentukan bahwa pengaduan adalah satu-satunya syarat bagi diprosesnya suatu delik. Tanpa pengaduan tidak mungkin ada penindakan suatu pidana.⁴¹ Penyelesaian secara adat merupakan salah satu upaya yang dipilih bagi masyarakat desa Pinjauan dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga karena melalui penyelesaian ini keputusan yang diambil merupakan keputusan berdasarkan kesepakatan bersama dan tidak merugikan kedua belah pihak. Proses penyelesaian ini dipimpin oleh Ninik Mamak.

Penyelesaian melalui hukum adat merupakan metode penyelesaian yang cocok dalam menangani perkara-perkara yang terjadi di Desa Pinjauan Kanagarian Pilubang karena mayoritas masyarakat Pinjauan masih mengutamakan penyelesaian berdasarkan hukum adat untuk menyelesaikan masalah kedua belah pihak dapat dibicarakan tanpa ada tekanan karena bersifat kekeluargaan yang memulihkan keadaan seperti semula dan dapat terikat kembali hubungan persaudaraan.⁴²

⁴⁰ Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Sinar Grafika, Surabaya, 2010, hlm. 65.

⁴¹ Erdianto Effendi, *Op. cit.* hlm. 198.

⁴² Wawancara dengan Bapak Bripka Asriko Naldi, Babimkamtibnas Kanagarian Pilubang, Tanggal 26 Maret 2020, Bertempat di Polsek Sungai Limau.

³⁸ *Ibid*, hlm 110.

³⁹ Syadri Adnansyah, *Op. cit.*, hlm. 42.

Berdasarkan hasil wawancara ketika terjadi kekerasan terhadap isteri kemudian niniak mamak sudah tidak sanggup lagi menyelesaikannya karena bentuk kekerasannya sudah sampai pada tingkat tindak pidana berat maka akan dilaporkan kepolisian. Tetapi selagi ninik mamak bisa mengusahakan jalan terbaik, maka cukup diselesaikan oleh ninik mamak.⁴³

Berdasarkan wawancara dengan ninik mamak selaku pemangku adat, Adapun urutan penyelesaian sengketa/perkara yang sering dilakukan adalah sebagai berikut:⁴⁴

1. Tahap persiapan.
 - a. Pengaduan/laporan bisa diberikan kepada Ninik Mamak. Ninik Mamak dan Mamak Mencarian informasi dari pengadu/pelapor atau orang yang diketahui mempunyai kasus.
 - b. Pencarian informasi dari pihak lainnya dilakukan dalam satu sampai tiga hari, memanggil kedua belah pihak yaitu pelaku, korban, saksi, keluarga, Urang Sumando, Cadiak Pandai, Alim Ulama, Bundo Kandung , mamak dari pihak pelaku dan korban.
 - c. Kemudian para pemangku Adat menentukan hari, dan tanggal, serta lokasi dari sidang adat yang akan dilakukan.
 - d. Penentuan tempat dan waktu ditentukan berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak, biasanya diadakan di rumah ninik mamak atau di rumah para pihak. Kesepakatan tempat dan waktu demi menciptakan rasa aman antara kedua belah pihak untuk bertemu dan menyelesaikan permasalahan.

2. Proses penyelesaian

a. *Duduak Basamo*

Duduak Basamo adalah musyawarah atau berunding yang dilakukan dengan pemuka adat dengan para pihak. Musyawarah secara bahasa kata *asy syura* diambil dari kata kerja

syawara yang berarti menampakkan sesuatu atau mengeluarkan madu dari sarang lebah.⁴⁵ Sedangkan kata musyawarah diambil dari bahasa Arab, yaitu *syura* yang diserap ke dalam bahasa Indonesia yang mengandung arti berunding dan berembuk.⁴⁶

Dalam *duduak basamo* ini maka penyelesaian KDRT akan dimulai sebagai berikut:⁴⁷

- 1) Disidangkan oleh ninik mamak, Mempertemukan para pihak, dikesempatan ini masing-masing pihak mengemukakan secara terbuka persoalannya dan didengar langsung pihak lawannya. Disini juga bisa terjadi tanya jawab, saling mengkonfirmasi dan bahkan saling silang pendapat. Semua kalangan yang berkaitan langsung dengan kejadian, seperti saksi, dihadirkan dan mengemukakan apa yang disaksikannya.
- 2) Selama persidangan ini para pemangku adat akan bermusyawarah dengan kedua belah pihak tentang kejadian tersebut untuk menyelesaikannya, supaya dapat menemukan kata mufakat, karena adat berpatokan *salingka nagari* yang hanya bisa diselesaikan dengan musyawarah untuk menemukan kata mufakat;
- 3) Setelah semua sudah dimusyawarahkan/disepakati dan menemukan kata mufakat maka para pemangku adat akan memutuskan perkara terhadap permasalahan tindak pidana tersebut. Pelaku wajib menerima apapun bentuk hukuman dan/denda.

Berdasarkan hasil wawancara proses penyelesaian perkara/tindak pidana dengan melibatkan Ninik Mamak ini diakui efektif, karena masyarakat sangat patuh dan

⁴³ Wawancara dengan *Bapak Muslim*, Pemuka Adat di desa Pinjauan, Tanggal 26 Maret 2020, Bertempat di Rumah Bapak Muslim.

⁴⁴ *Ibid*,

⁴⁵ Waryono Abdul Ghafur, *Tafsir Sosial*, el.SAK Press, Yogyakarta. 2005, hlm 153

⁴⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Op.cit*, hlm. 677

⁴⁷ *Ibid*.

menghormati Ninik Mamak, para pihak juga tidak berani membantah apa yang telah disepakati, serta mampu menghilangkan perasaan dendam diantara para pihak.⁴⁸

3. Pemberian Nasehat Oleh Pemangku Adat dan Alim Ulama

Maka nasehat yang akan di berikan kepada laki-laki pelaku KDRT, oleh para pemangku adat maupun Alim Ulama adalah sebagai berikut.⁴⁹

- a. Agar menjalin keluarganya dengan menanamkan ilmu agama dalam hati dan perbuatannya agar terhindar dari emosi yang mengakibatkan kekerasan dalam rumah tangga;
- b. Setelah dilakukannya perbuatan KDRT tersebut, para pemangku adat dan pihak lainnya berharap agar pelaku KDRT ini menyesal atas perbuatannya, karena perbuatan tersebut menimbulkan banyak mudharat;
- c. Sebagai seorang imam dalam rumah tangganya jika rumah tangganya hancur maka seorang imamlah yang harus bertanggungjawab dalam memperbaikinya, apalagi kehancuran rumah tangga disebabkan oleh imam itu sendiri, agar kedepannya dapat diperbaiki oleh pelaku KDRT agar tidak melakukan kekerasan lagi.
- d. Meminta pelaku KDRT untuk meminta maaf kepada seluruh anggota musyawarah dengan setulus hati kepada keluarganya. Terutama kepada isteri dan anaknya dimana perbuatan yang ia lakukan telah menyakiti hati isteri, anaknya dan keluarganya tersebut, serta meminta maaf kepada anggota musyawarah yang hadir.
- e. Kemudian nasehat mengenai akibat dari perbuatannya tersebut menyebabkan dia harus membayar denda sesuai kesepakatan para Pemangku Adat. Dalam

hal ini pelaku KDRT mau tidak mau harus membayar denda tersebut.

Nasehat yang akan di berikan kepada perempuan korban KDRT, oleh para pemangku adat maupun Alim Ulama adalah sebagai berikut:⁵⁰

- a. Memberitahukan bahwa ia adalah seorang istri yang harus patuh dan menjaga kehormatan keluarganya, seorang ibu yang menjadi contoh untuk anak-anaknya, seorang anak yang harus berbakti pada orang tuanya, dan menasehati bahwa surga seorang perempuan ada pada suaminya;
 - b. Sebagai seorang isteri dan ibu harus menjaga emosi dalam segala hal
 - c. Harus bersabar dan tidak melawan suami, apabila ada masalah harus diselesaikan secara dingin tidak menggunakan emosi;
 - d. Meminta maaf dengan setulus hati kepada suami, kepada anak-anak, dan kepada keluarga terkait, serta meminta maaf kepada seluruh anggota musyawarah yang hadir.
- ### 4. Denda

Pelaku KDRT harus membayar denda dengan membayar beberapa saksemen dan beberapa truk pasir karna perbuatannya yang telah *mencoreang muko niniak mamak* dalam satu kaum.

Tata cara pembayaran denda adalah setelah pelaku disidangkan oleh ninik mamak, bagi anak kemenakan yang melakukan KDRT akan dikenakan denda secara adat yaitu membayar minimal 5 sak semen dan 1 truk pasir atau uang seharga barang tersebut, yang langsung akan diterima oleh ninik mamak dan akan dipergunakan untuk pengaspalan jalan rusak dan memperbaiki bendungan air.⁵¹

Hasil wawancara dengan Bapak Juprizal Suku Koto beliau mengatakan kasus Kekerasan dalam rumah tangga yang pernah diputuskan yaitu kasus pada tahun 2017 dilakukan oleh RS (45 Tahun) terhadap TT (40 Tahun), yang

⁴⁸ Wawancara dengan *Bapak Mansur*, Masyarakat di desa Pinjauan, Tanggal 25 Maret 2020, di Bertempat di Desa Pinjauan Kanagarian Pilubang.

⁴⁹ Wawancara dengan *Aciak Muslim*, Alim Ulama desa Pinjauan, Tanggal 24 Maret 2020, di Desa Pinjauan Kanagarian Pilubang.

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ Muslim, *Loc.cit.*

mana RS adalah suami TT, RS adalah seorang petani. RS yang sepulang kerja merasa kelelahan mendapatkan tuntutan yang beragam dari istrinya TT, RS yang merasa kesal dengan tuntutan TT dalam kondisi lelah sepulang kerja tidak bisa menahan emosi sehingga memukul wajah TT yang menyebabkan luka memar dan mengakibatkan istrinya ketakutan, hilangnya rasa percaya diri dan rasa tidak berdaya, kemudian TT menceritakan masalah tersebut kepada keluarganya dan meminta cerai, tetapi RS tidak ingin bercerai dari TT kemudian masalah mereka diselesaikan secara adat. RS dikenakan sanksi adat berupa denda yang diberikan oleh ninik mamak dan pemuka adat dengan membayar 5 saksemen dan 1 truk pasir atau uang sejumlah Rp. 400.000.00

Selain kasus di atas juga kasus pada tahun 2018 dimana pelaku kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh RN (45 Tahun) terhadap SS (40 Tahun), yang mana RN adalah suami SS, RN adalah seorang guru. mereka memiliki seorang anak, RN sering melontarkan kata-kata kasar kepada istrinya sehingga SS mengalami tekanan batin, psikologi, dan merasa takut kepada RN, kemudian SS menceritakan masalah tersebut kepada keluarganya dan meminta cerai, tetapi RN tidak ingin bercerai dari SS kemudian masalah mereka diselesaikan secara adat. RN berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan RN dikenakan sanksi adat berupa denda yang diberikan oleh ninik mamak dan pemuka adat dengan membayar 5 saksemen dan 1 truk pasir atau uang sejumlah Rp. 400.000.00⁵²

Alasan masyarakat menyelesaikan kasus KDRT secara adat bukan secara pidana (Kepolisian) adalah:⁵³

a. Ninik mamak malu.

Artinya kalau kasus KDRT ini sampai ke kepolisian maka mamak suku tersebut (pelaku) akan malu karena dianggap tidak bisa menjaga anak kemenakan serta juga tidak sanggup menyelesaikan masalah di suku tersebut.

b. Kaum malu

Maksudnya adalah kalau pelaku KDRT adalah kaum tersebut maka satu kaum itu akan jadi malu karena selalu jadi pergunjungan oleh masyarakat lain/ kaum lain. Dan kaum tersebut akan tercemar di mata masyarakat.

c. Biaya

Kalau kasus tersebut sampai ke kepolisian akan menghabiskan biaya yang besar, sedangkan kalau di selesaikan secara adat biayanya sedikit dan tidak berbelit-belit.⁵⁴

B. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dalam Menyelesaikan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Desa Pinjauan Kanagarian Pilubang Kecamatan Sungai Limau

Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dalam Menyelesaikan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Desa Pinjauan Kanagarian Pilubang Kecamatan Sungai Limau antara lain:⁵⁵

1. Faktor Diri Sendiri

Korban tidak mau menceritakan secara jujur masalah KDRT yang telah terjadi kepada ninik mamak karena adanya anggapan bahwa itu adalah aib keluarganya jangan sampai diketahui oleh orang lain. Hal ini menyebabkan munculnya perasaan malu karena akan dianggap oleh lingkungan tidak mampu mengurus rumah tangga. Jadi rasa malu mengalahkan rasa sakit hati, masalah dalam keluarga bukan untuk diketahui oleh orang lain sehingga hal ini dapat berdampak semakin menguatnya KDRT.

⁵² Wawancara dengan Bapak Juprizal, Pemangku Adat di desa Pinjauan, Tanggal 25 Maret 2020, Bertempat di Desa Pinjauan Kanagarian Pilubang.

⁵³ Wawancara dengan Bapak Sidi Mulyadi, Masyarakat di desa Pinjauan, Tanggal 25 Maret 2020, Bertempat di Desa Pinjauan Kanagarian Pilubang.

⁵⁴ Nurlinda Yenti, *Op.cit.* hlm. 12.

⁵⁵ Wawancara dengan Tuangku Burhan, Dt. Sinaro, ninik mamak Suku Piliang, Tanggal 24 Maret 2020, Bertempat di Desa Pinjauan Kanagarian Pilubang.

Keenganan kemenakan untuk meminta pertimbangan kepada mamaknya sering kali diikuti dengan tindakan mamaknya yang tidak mau proaktif dalam menjalankan fungsinya sebagai mamak. Kondisi ini membuat hubungan mamak kemenakan menjadi semakin jauh sehingga mamak menyetujui saja keinginan kemenakan untuk bercerai tanpa terlebih dahulu memberikan solusi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga kemenakannya.⁵⁶

2. Faktor Penegak Hukum

Kendala yang dihadapi oleh para penegak hukum khususnya para pemuka adat adalah timbulnya rasa kasihan atau rasa simpati, terutama kepada pelaku yang berasal dari keluarga kurang mampu. Sehingga para pemuka adat tidak memberikan sanksi yang terlalu berat. Lemahnya penerapan sanksi yang diterapkan oleh para pemuka adat terhadap pelaku KDRT terutama terhadap masyarakat dengan golongan ekonomi rendah ini, sehingga dapat dengan mudah memicu terjadinya perbuatan KDRT di daerah yang bersangkutan dan juga menimbulkan rasa ketidakadilan bagi masyarakat lain dalam penerapan Sanksi tersebut.

3. Faktor Masyarakat

Adanya sebagian dari masyarakat setempat yang mengetahui bahkan melihat secara langsung tindak pidana KDRT tersebut namun mereka enggan untuk melaporkannya. Hal ini disebabkan karena sebagian masyarakat tidak mau atau takut untuk terlibat dalam masalah tersebut, karena takut akan adanya ancaman dari pihak pelaku untuk tidak mengungkapkan kejadian yang sebenarnya. Sehingga para pelaku bebas begitu saja dalam melakukan tindakan ini dan karena sikap masyarakat yang tidak peduli akan lingkungan seperti inilah yang menyebabkan perbuatan KDRT ini

terus berkembang dari waktu kewaktunya. Faktor ini adalah faktor yang sangat berpengaruh tidak diterapkannya Sanksi Adat Terhadap pelaku KDRT di Desa Pinjauan Kanagarian Pilubang.⁵⁷

4. Faktor Budaya

Perilaku KDRT sudah merupakan hal yang biasa terjadi atau bahkan sudah menjadi budaya dalam kehidupan masyarakat yang semakin berkembang. Sehingga dengan semakin maju gaya hidup dan terjadinya modernisasi di lingkungan masyarakat, perilaku KDRT dianggap hal yang biasa atau menjadi budaya dalam masyarakat. Selain itu juga pandangan bahwa cara yang digunakan orang tua untuk memperlakukan anak-anaknya, atau cara suami memperlakukan istrinya, sepenuhnya urusan mereka sendiri yang mana tidak boleh dicampuri oleh pihak lain.

Kendala-kendala tersebut perlu segera diatasi oleh para pemuka adat dengan meningkatkan kerjasama dengan masyarakat agar korban yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga berani untuk menceritakan peristiwa yang dialaminya dan guna memberikan perlindungan terhadap korban agar bebas dari rasa takut dan segala bentuk ancaman kekerasan baik fisik maupun psikis.⁵⁸

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga di desa Pinjauan Kanagarian Pilubang Kecamatan Sungai Limau yaitu *pertama*, persiapan Ninik Mamak memanggil kedua belah pihak yaitu pelaku, korban, saksi, keluarga, Urang Sumando, Cadiak Pandai, Alim Ulama, Bundo Kandung dan mamak dari pihak pelaku, kemudian para pemangku Adat menentukan hari, dan tanggal, serta lokasi dari sidang adat yang akan dilakukan. *Kedua, duduak basamo* bermusyawarah untuk

⁵⁶ Wawancara dengan *Bapak Muslim*, Pemuka Adat di desa Pinjauan, Tanggal 25 Maret 2020, Bertempat di Desa Pinjauan Kanagarian Pilubang.

⁵⁷ Tuangku Burhan, *Loc.cit*

⁵⁸ Muslim, *Loc.cit*

menemukan kata mufakat dan memutuskan perkara KDRT tersebut. *Ketiga*, pelaku dan korban KDRT diberi nasehat oleh pemuka adat dan alim ulama. *Keempat*, setelah pemberian nasehat pelaku harus membayar denda yang telah disepakati

2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam menyelesaikan kekerasan dalam rumah tangga di desa Pinjauan Kanagarian Pilubang Kecamatan Sungai Limau antara lain *pertama*, faktor diri sendiri yaitu korban tidak mau menceritakan secara jujur masalah KDRT yang telah terjadi kepada ninik mamak karena adanya anggapan bahwa itu adalah aib keluarganya jangan sampai diketahui oleh orang lain. *Kedua*, faktor penegak hukum yaitu timbulnya rasa kasihan atau rasa simpati, terutama kepada pelaku yang berasal dari keluarga kurang mampu. *Ketiga*, faktor masyarakat disebabkan karena sebagian masyarakat tidak mau atau takut untuk terlibat dalam masalah tersebut, karena takut akan adanya ancaman dari pihak pelaku untuk tidak mengungkapkan kejadian yang sebenarnya. *Keempat*, Faktor budaya perilaku KDRT dianggap hal yang biasa atau menjadi budaya dalam masyarakat. Selain itu juga pandangan bahwa cara yang digunakan orang tua untuk memperlakukan anak-anaknya, atau cara suami memperlakukan istrinya, sepenuhnya urusan mereka sendiri yang mana tidak boleh dicampuri oleh pihak lain.

B. Saran

1. Untuk pemangku adat, tokoh agama dan tokoh masyarakat yang memiliki wewenang dalam mengendalikan masyarakat agar lebih tegas dalam menetakan dan memutuskan sanksi yang diberikan kepada pelaku KDRT, sehingga memberikan efek jera terhadap pelaku KDRT.
2. Hendaknya melakukan sosialisasi mengenai "*adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*" ke institusi pendidikan ataupun masyarakat pada umumnya agar menjauhi perbuatan yang dilarang oleh adat dan agama, mengadakan kajian-kajian agama dan mengadakan kajian mengenai adat serta mengembalikan budaya ke *Surau*.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul, Kadir, Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ashshofa, Burhan, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Batuah, Dt. Maruhun dan Dt. Bagindo Tanameh, 1956, *Hukum Adat Dan Adat Minangkabau*, Poesaka Aseli, Jakarta.
- Effendi, Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, PT. Rafika Aditama, Bandung.
- , 2017, *Hukum Pidana Adat*, PT Refika Aditama, Pekanbaru.
- Ghafur, Waryono Abdul, 2005, *Tafsir Sosial*, el.SAK Press, Yogyakarta.
- Gustiniati, Diah dan Budi Rizki, 2014, *Azaz-Azaz & Pemidanaan Hukum Pidana Di Indonesia*.BP. Justice Publisher, Bandar Lampung.
- Hadiati, Soeroso, Moerti, 2010, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis- Viktimologis*, Sinar Grafika, Surabaya.
- Hadikusama, Hilman, 2002, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Haizairin, 1990, *Demokrasi Pancasila*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Hakimy, H.Idrus, 2001, *Rangkaian Mustika Adat Basandi Syarak di Minangkabau*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Iskandar, 2008, *Metode Penelitian dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*, Gaung Persada Press, Jakarta.
- Navis. A.A, 1984, *Alam Berkembang Jadi Guru*, PT.Grafity Pers, Jakarta.
- Pide, Suriyaman, Mustari 2015, *Hukum Adat (Dahulu, Kini dan Akan Datang)*, Kencana, Jakarta.
- Piliang, Nasrun Dt. Marajo Sungut dan Edison, 2013, *Tambo Minangkabau (Budaya dan Hukum Adat di Minangkabau)*, Kristal Multimedia, Bukit Tinggi.
- Sjarifoedin, Amir, 2011. *Minangkabau Dari Dinasti Iskandar Zulkarnain Sampai Tuanku Imam Bonjol*, PT Gria Media Prima, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 1977 , 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-press, Jakarta.

Soepomo, 2000, Bab-bab Tentang Hukum Adat, PT. Pradnya Paramitha, Jakarta.

ST. Mahmoed BA dan A.Manan Rajo Penghulu, 1978, *Tambo Minangkabau dan Bukti Sejarah*, Pustaka Indonesia, Medan.

Sunggono, Bambang, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Suwardi, Rahmad Hendra, et. al., 2011, *Hukum Adat Melayu Riau*, Pekanbaru.

Syahrizal, 2004, *Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia :Refleksi terhadap Beberapa Integrasi Hukum dalam Bidang Kewarisan di Aceh*, Nadya Foundation, Aceh.

Zainuddin, Musyair, 2013, *Minangkabau dan adatnya : adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*, Ombak, Yogyakarta.

B. Jurnal/Skripsi/Tesis/ Kamus/ Makalah

Andrew Lionel Lawdika, 2016, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi , Lex Crime Vol. V/No. 2/ Feb.

Departemen Pendidikan Nasional, 2002, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Hasanuddin, 2019, "Undang Dan Pelembagaan Mahkamah Adat Minangkabau", makalah disampaikan pada Seminar Internasional dan Festifal Tradisi Lisan ke X, Universitas Andalas, ATL Cabang Sumatera Barat.

Hendra Eka Saputra , 2012, "Upaya Penyelesaian Sengketa Yang Berkaitan Dengan Tindak Pidana Dan Aturan-Aturan Yang Ditetapkan Oleh Masyarakat Hukum Adat (Studi Kasus Pada Nagari Lubuak Batingkok Propinsi Sumatera Barat)", *Tesis*, Fakultas Hukum Program Pascasarjana Jakarta, Universitas Indonesia.

Muhammad Rido I, 2016, " Penerapan Pidana Adat dan Pidana Dalam KUHP Terhadap Pelaku Tindak Pidana Zina Dikaitkan Dengan Peran Kepolisian Studi Kasus

Wilayah Hukum Adat Persukuan Domo Air Tiris Dan Kepolisian Resor Kampar", Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Riau , Pekanbaru.

Nurlinda Yenti, 2017, "Sanksi Pidana Adat Terhadap Pelakutindak Pidana Perzinaan Di Nagari Ulakan Kabupaten Pariaman", *Normatif Jurnal Ilmiah Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Taman Sari Padang, Vol 5 No 1, April.

Syadri Adnansyah, 2015, "Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Terjadi Di Kota Pare-Pare (Studi Kasus Putusan No. 54/Pid.Sus/2014/Pn.Parepare)", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.

Tri Rahmadhaniati, 2018, "Penerapan Sanksi Adat Terhadap Pelaku Zina Di Desa Kampung Baru Sentoja Kecamatan Sentoja Raya Kabupaten Kuansing", Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Riau , Pekanbaru.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

D. Website

<https://munirtaheer.wordpress.com/2013/01/29/undang-undang-nan-dua-puluh-dan-hukum-adat-di-silungkang/>, diakses pada tanggal 18 Maret 2020.